PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM

Mutia Rahmi
Email: 2010003600206@unespadang.ac.id
No BP: 2010003600206
Universitas Ekasakti Padang

A. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan istilah yang sudah familiar dalam masyarakat bila membahas suatu negara yang memuat pemikiran panjang dari berbagai ahli. Akan tetapi tidak banyak yang tahu tentang bagaimana perjalanan dari pemikiran negara hukum itu sendiri.

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX yang merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Sehingga unsur-unsur negara hukum dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari negara atau pun ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut ditegaskan oleh Aristoteles. Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara.

Dalam perkembangannya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep

universal, tapi pada implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi sejarah suatu negara, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model. Meskipun demikian, semua ahli sepakat bahwa sebuah negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata atau dikenal dengan istilah *Machstaat*. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di dalam negara penganut negara hukum, maka hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi, dimana dalam konstitusi berisi kesepakatan/konsensus bersama atau *daat* diartikan sebagaimana hukum dasar negara. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum dan konstitusi bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau disitilahkan dengan *Rule By law Not Rule By Man*. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum.

B. PEMBAHASAN

Sejarah timbulnya negara hukum itu sendiri sudah berlangsung sangat lama. Sebelum mempelajari negara hukum, ada baiknya terlebih dahulu untuk dapat memahami pemikiran-pemikiran negara hukum, sebagai berikut ini:

1) Pemikiran Plato

Dalam pemikirannya Plato yang dilatar belakangi oleh kehidupan pada jaman Yunani kuno bahwa hukum adalah sebuah cerminan dari perintah ilahi yang penuh akan kebajikan dengan sifat yang konsisten, seperti yang diketahui bahwa bentuk negara pada jaman Yunani Kuno adalah sebuah negara yang berbentuk negara kota (*polis*) dan dalam sejarah dapat disebutkan merupakan awal dari munculnya sebuah aturan-aturan yang dituangkan dalam bentuk permanen yang kemudian digunakan oleh publik pada akhir abad ke tujuh dan awal abad kedelapan SM Plato menulis sebuah percakapan antara tiga orang wakil yang berasal dari Athena, Sparta, dan Kreta.

Tiga orang tersebut dalam bukunya Plato disebutkan sebagai seorang *Athenian Stranger* dengan *Clinias of Crete* dan *Megillius of Lacedaemon*. Ketiganya mendiskusikan tentang siapakah yang menulis aturan hukum, apakah Tuhan yang menulis hukum ataukah seorang manusia. Dalam percakapan tersebut mengatakan Zeus sebagai pemberi hukum,

kemudian bahwa pembuat hukum merupakan seorang pahlawan ilahi, sehingga ia dapat membuat hukum yang berlaku untuk semua.

Berdasarkan kepercayaan mitologi masyarakat Yunani Kuno, Zeus merupakan dewa langit, dewa yang menguasai petir, dewa yang menguasai hujan, dewa yang menguasai salju, bahkan di percaya sebagai dewa yang menguasai badai, dan juga dipercaya sebagai pemimpin dari para dewa. Maka dari percakapan yang dibuat oleh Plato di dalam Bukunya yang berjudul *Laws* tersebut, maka dapat dikatakan Plato berpendapat bahwa hukum adalah merupakan sebuah cerminan dari Perintah Tuhan, yang konsisten dengan kebaikan. Plato juga berpendapat bahwa di dalam kehidupan masyarakat hukum juga berperan penting dalam menghadapi kehancuran yang terjadi, sehingga pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus juga terikat dengan hukum. Dan suatu hukum di dalam negara yang berbentuk sebuah konstitusi yang harus dibuat oleh mereka yang memiliki bijaksana dan pendapat yang benar untuk mendukung keadilan.

2) Pemikiran Aristoteles

Aristoteles yang merupakan murid dari Plato juga memberikan pandangannya tentang sebuah negara hukum. Aristoteles mengatakan bahwa negara itu ada untuk membuat kehidupan menjadi baik, dan di dalam sebuah negara terdapat sebuah konstitusi yang memiliki prinsip bahwa warga negara suatu negara atau anggota dari kota tersebut adalah sama dan setara sehingga dalam pemikiran Aristoteles negara hukum harus identik dengan adanya demokrasi yang diwujudkan dalam sebuah pernyataan bahwa ketika salah satu anggota masyarakat suatu negara memegang sebuah jabatan tinggi harus dilakukan secara bergilir.

Menurut Aristoteles bahwa konstitusi yang disebut dengan *Politeia* merupakan sesuatu yang tertinggi (*to kurion*), namun di dalam tulisannya Aristoteles membedakan sebuah konstitusi menjadi 2 jenis konstitusi, yaitu sebuah Konstitusi yang baik dan sebuah konstitusi yang buruk.

Oleh karena itu menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum. Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi

yaitu *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

3) Pemikiran Para tokoh lainnya pada zaman Yunani Kuno

Dalam pemikiran Solon untuk memiliki pengembangan sebuah negara di Athena yang disediakan adalah “kesamaan hukum untuk semua macam pribadi”, dan itu yang diperintahkan oleh penerapan dari yang mengetahui aturan-aturan, dan apabila dilihat dari kepercayaan pragmatik Yunani bahwa hal yang terpenting dalam sistem negara hukum yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Pendapat Pericles menyatakan bahwa, “seperti hal hukum, semua orang yang pada pinjakan yang sama sejauh perhatian keputusan pribadi mereka”.

Herodotus seorang sejarawan besar Yunani, menegaskan, “walaupun bebas, yang tidak bebas dalam segala hal: mereka memiliki seorang tuan, yaitu hukum”, yang mereka “takut” bahkan lebih daripada Persia Raja tirani mereka, Xerxes.

Pemikiran tentang hukum yang berasal dari para filsuf pada jaman Yunani kuno membawa kondisi pada memberikan perhatian tertentu untuk menulis undang-undang sebagai sumber dari hukum .

Dalam mewujudkan sistem negara hukum, mekanisme pemerintahan Yunani Kuno mengandalkan pada campuran pemerintah (dimana kekuasaan yang memisahkan antara perwakilan badan-badan kelas berbeda dari masyarakat) yang bertujuan untuk menghindari konsentrasi dari semua kekuatan di dalam satu kesatuan dan mencegah Assuan, Afrika Utara, Suriah, Negara di Utara Laut Hitam dan banyak di wilaah bagian Laut Aegea dan Dataran Yunani sehingga Yunani mengakui legitimasi dari resistensi/perlawanan kepada tirani.

4) Pemikiran Cicero mengenai Negara Hukum

Cicero merupakan seorang filsuf yang berasal dari jaman romawi kuno, mengatakan bahwa hukum merupakan cerminan dari manusia itu sendiri.

5) Pemikiran Thomas Aquinas mengenai Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum pada abad pertengahan, seperti Thomas Aquinas yang menggunakan pemikiran Arstoteles, bahwa seorang hakim harus diatur oleh hukum, dan hakim

tidak dapat memutuskan sesuai dengan kehendak mereka, maka seperti halnya pemikiran Aristoteles, Thomas Aquinas menegaskan bahwa hukum harus didasari sebuah alasan yang harus diorientasikan kepada kepentingan dan kebaikan umum, selain itu Thomas Aquinas menyatakan bahwa *Law is an 'exterior principle' moving us to good, namely, God, who 'instructs us through law'*. Yang artinya adalah bahwa Thomas Aquinas memandang hukum merupakan sebuah prinsip luar yang meghendaki umat manusia menjadi sesuatu hal yang baik, dan di dalam hukum pun terdapat peran dari Tuhan yang menginstruksikan manusia melalui hukum agar menjadi lebih baik, berarti di dalam hukum tersebut Tuhan juga berperan untuk mendidik manusia agar manusia tidak melakukan sebuah kesalahan.

Selanjutnya, Thomas Aquinas berpendapat bahwa untuk menjaga keilahian atau instruksi dari Tuhan tersebut harus dijaga oleh pemerintah, dan pemerintah diibaratkan sebagai *as a master, who not only imparts knowledge to his pupils but also* Selanjutnya menurut Thomas Aquinas bahwa pembuat Undang-Undang atau para Legislator harus menyesuaikan suatu hukum dengan kebiasaan kebiasaan yang ada di masyarakat.

6) Pemikiran Thomas Hobbes mengenai Negara Hukum

Thomas Hobbes menyatakan dalam sebuah bukunya yang berjudul "*de cive*" yang mengatakan sebuah istilah *That Man to Man is a kind of God; and that Man* yaitu di sisi yang lain manusia dapat seperti Tuhan kepada manusia lainnya yaitu penuh kasih sayang dan penuh perlindungan yang menginginkan suatu perdamaian dan keamanan dalam kehidupannya, namun di sisi yang lain sifat manusia juga dapat seperti *to Man is an arrant Wolfe*. Pemahaman terhadap *Man is a* Inggris.

Wolf to man yaitu dimaksudkan bahwa manusia adalah Serigala bagi manusia lainnya, yang dapat diartikan bahwa manusia dilihat seperti Serigala berdasarkan pada sifat alamiah manusia yang memiliki insting seperti Serigala yang rakus, sehingga menurut pemikiran Hobbes dikarenakan manusia memiliki sifat alamiah seperti Serigala, maka manusia dapat memangsa manusia lainnya yang diartikan dapat memanfaatkan manusia lainnya demi memenuhi hasrat alamiah pribadinya, tanpa harus memikirkan manfaat apa yang diperoleh manusia yang dimanfaatkan tersebut, apakah manusia lainnya itu menderita atau tidak terhadap pemenuhan hasrat alamiah dari manusia lainnya. Maka berdasarkan sifat tersebut yang berisikan sebuah kehendak dari setiap manusia, dituangkan dalam sebuah kontrak untuk melihat hak dan kewajibannya, sehingga di dalam kontrak untuk masyarakat yang luas harus berisikan tentang kehendak dari semua orang atau kehendak yang berkumpul bersama yang

harus tujuannya untuk kebaikan bersama dari masyarakat bukan berdasarkan kehendak seseorang yang bagaikan serigala rakus yang menindas mangsanya. Kontrak sosial dari pemikiran Thomas Hobbes memperlihatkan lebih jelas tentang hukum yang dibuat oleh negara sebagai sebuah kontrak antara penguasa yang mengatur suatu negara dengan masyarakatnya dan kontrak tersebut di tuangkan dalam sebuah konstitusi atau dituangkan dalam sebuah Undang-Undang dari suatu negara, agar semua pihak lebih jelas melihat hak dan kewajibannya, bahkan dapat meminimalkan kehendak seseorang untuk menjadi serigala yang rakus yang dapat menyengsarakan masyarakat.

7) Pemikiran Jhon Locke mengenai Negara Hukum

Pemikiran John Locke berpendapat bahwa berjalannya sebuah negara sebagai langkah sebuah politik adil dan benar, tidak hanya bertitik pada sebuah supremasi hukum yang dituangkan dalam sebuah konstitusi atau pun Undang-Undang, namun juga perlu diperhatikan sebuah pemerintahan yang reguler oleh Legislatif.

Selain itu John Locke juga berpendapat bahwa langkah yang dilakukan pihak eksekutif merupakan sebuah kekuatan untuk berbuat yang baik tanpa harus melawan hukum sesuai dengan kebutuhan. Konstitusi yang dilihat oleh John Locke tidak hanya sebagai pembatasan terhadap sistem monarki, namun juga merupakan sebuah pertahanan rakyat atau dapat dikatakan sebagai hak-hak secara alamiah yang digunakan sebagai dasar atau kekuatan superior untuk pembentukan sebuah pemerintah yang berdasarkan atas Undang-Undang. Selain membahas sebuah konstitusi, Jhon Locke melihat bahwa sebuah negara hukum harus memiliki sebuah pembagian kekuasaan untuk menegakkan konstitusi, yaitu perlunya sebuah kekuatan legislatif dan kekuatan eksekutif untuk menjalankan sebuah negara berdasarkan hukum, yang tujuannya untuk menekan kekuasaan yang timbul dari sebuah pemikiran tirani dari seorang penguasa .

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang memiliki hak untuk mengarahkan kekuatan untuk mencapai kemakmuran yang digunakan untuk menjaga sebuah masyarakat di dalam suatu negara, sehingga kekuasaan legislatif ini harus selalu ada untuk menjamin adanya suatu hukum yang mengatur untuk kepentingan umum. Sedangkan kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan sebagai eksekutor, dan Agar tidak adanya kekuasaan yang bertumpu pada satu kekuatan yaitu kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan kekuasaan untuk eksekutor aturan hukum yang dapat membuat orang yang memiliki kedua kekuasaan tersebut

kebal terhadap hukum yang dibuat oleh dirinya sendiri, maka kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif harus dilakukan secara terpisah.

Selain kedua kekuasaan tersebut, menurut Jhon Locke terdapat kekuasaan lainnya, yaitu Federatif. Kekuasaan federatif ini memiliki kekuatan akan perang dan perdamaian, membentuk sebuah liga maupun aliansi dengan negara lainnya.

Dalam hal ini Jhon Locke berfikir pentingnya kekuasaan federatif ini untuk melakukan sebuah tindakan yang hanya berkaitan dengan pihak asing tanpa harus tercampur dengan urusan dalam negeri, dikarenakan untuk urusan di dalam negeri sudah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan eksekutif.

8) Pemikiran Baron De Montesquieu mengenai Negara Hukum

Dalam Konsep yang diperkenalkan oleh Montesquieu ini dikenal dengan nama “*Trias Politica*” yang fungsinya memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana seperti yang diketahui secara umum tentang pemikiran Montesquieu bahwa kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan atau menjalankan dari Undang-Undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggar Undang-Undang.

Dalam pemikiran *Trias Politica* yang dikemukakan oleh, Montesquieu melihat apabila kekuatan yang dimiliki oleh legislatif jika digabungkan dengan kekuatan eksekutif dan kekuasaan kehakiman berada pada satu orang atau satu lembaga, maka dapat menimbulkan kekuasaan sangat besar yang dapat menuju pada tirani atau kesewenang-wenangan dari si pemegang tiga kekuasaan tersebut.

9) Pemikiran Jean Jacques Rousseau mengenai Negara Hukum

Jean Jacques Rousseau melihat bahwa sebuah negara perlu menerapkan sebuah kontrak sosial yang tujuannya untuk membatasi seseorang dari kebebasan alamiah yang tidak terbatas. Kebebasan alamiah dari pandangan Rousseau adalah keadaan dimana manusia melihat keadilan secara primitif yang hanya berkaitan dengan fisik, pemenuhan nafsu manusia dan nilai moralitas yang kurang, sehingga berjalannya sebuah keadaan yang awalnya dari keadaan alamiah.

Fungsi dari kontrak sosial ini dalam sistem negara hukum bagi masyarakat sebagai masyarakat sipil adalah terbentuknya sebuah kesepakatan yang jelas antara negara dengan warga negaranya, maka dengan adanya kesepakatan melalui sebuah kontrak sosial akan mewujudkan sebuah kedaulatan yang menciptakan kesetaraan diantara warga negara serta

menciptakan kehendak umum dan sebuah komitmen kesetaraan hak dan mewajibkan warga negaranya mendukung negaranya secara setara, hal ini merupakan sebuah terobosan besar mengenai perkembangan negara hukum pada jaman Rousseau, dan mungkin dapat dikatakan bahwa pemikiran kontrak sosial ini merupakan penyempurnaan dari pemikiran negara hukum setelah pemikiran dari John lock dan Montesquieu.

10) Pemikiran Immanuel Kant mengenai Negara Hukum

Pemikiran Immanuel Kant berfokus pada etika, studi filosofis tentang tindakan moral. Dia mengusulkan hukum moral yang disebut "imperatif kategoris," yang menyatakan bahwa moralitas berasal dari rasionalitas dan semua penilaian moral didukung secara rasional. Apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah tidak ada area abu-abu. Manusia diwajibkan untuk mengikuti perintah ini tanpa syarat jika mereka mengaku bermoral.

Namun yang diharapkan oleh Kant dikarenakan terdapat kehendak umum dari masyarakat dan hak-hak eksternal individu, maka konstitusi, Undang-Undang sebagai wujud dari kontrak sosial harus berisikan moral di dalamnya serta adanya persyaratan yang penuh dengan kebajikan untuk menjaga martabat warga negaranya dan negara itu sendiri.

Selain menitik beratkan pada kontrak sosial, supremasi hukum, menurut pandangan Kant lebih lanjut terhadap negara hukum juga harus berisikan hubungan dan karakteristik tiga kekuatan seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yaitu bahwa

11) Pemikiran Karl Marx

Pemikiran Karl Marx mengenai hukum menunjukkan bahwa kekuasaan terhadap hukum harus berada ditangan negara, dikarenakan negaralah yang memiliki kewenangan membuat aturan hukum untuk kebaikan kepentingannya sendiri, maka hukum tersebut berasal dari politik dan tentu saja terikat erat dengan negara sebagai bentuk otonomi sebuah negara dan sebuah hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara dalam bentuk Undang-Undang merupakan sebuah cerminan yang mengungkapkan atau yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, selain itu hukum yang berpotensi memaksa sebagai bentuk kekuasaan sebuah negara sebagai wujud dari monopoli negara, dan tentu saja hukum yang dibuat merupakan bentuk dari kepentingan negara dalam mengelola masyarakatnya yang merupakan wujud dari teori kedaulatan sebuah negara.

12) Pemikiran Albert Venn Dicey

Pemikiran Albert Venn Dicey mengenai negara hukum cukuplah dikenal, dalam pemikiran A.V Dicey mengenai Negara Hukum, terdapat 3 unsur yang harus dimiliki sebuah negara hukum.

Dicey melihat bahwa supremasi ini bukanlah suatu sistem yang digunakan untuk kesewenang-wenangan penguasa dalam melakukan tindakan, namun dominasi hukum yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menjalankan aturan hukum yang berdasarkan atas hak prerogatif maupun kewenangan diskresi yang luas dimiliki oleh pemerintah, Dicey melihat hal tersebut seperti apa yang terjadi di Inggris bahwa benar seseorang dikuasai oleh hukum dan hanya oleh hukum saja, bukan dikuasai oleh penguasa sehingga bagi yang melanggar aturan tersebut tentu saja harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang ada dan tidak untuk lainnya.

Dalam unsur lainnya untuk negara Hukum, yaitu *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, disini Dicey membandingkan antara hukum administrasi yang diterapkan di Perancis dengan penerapan hukum yang dilakukan di Inggris. Dicey melihat sebuah kesetaraan penerapan hukum yang ditujukan untuk semua kelas atau strata masyarakat dan itupun di kelola oleh pengadilan Hukum biasa yang tentu saja berbeda dengan yang diterapkan di Perancis yang penganut hukum Eropa kontinental yang berisikan hukum administrasi.

Di dalam *the law of the constitution*, Dicey melihat bahwa peraturan di negara-negara selain Inggris sebetulnya sudah membentuk sebuah aturan yang secara alami bagian dari konstitusional mereka, dan konstitusi tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari hak-hak individu yang sebagaimana harus dijelaskan dan didefinisikan serta ditegakkan oleh badan Pengadilan, sehingga untuk prinsip-prinsip privat sebenarnya sudah dilakukan dalam tindakan pengadilan dan parlemen yang diperluas untuk menentukan posisi putra mahkota dan pelayannya, pernyataan Dicey mengenai adanya Putra mahkota dikarenakan pandangan atau pengamatan terhadap Negara Hukum bersumber dari kebiasaan negara Inggris.

13) Pemikiran Utrecht

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih

mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *'Law in a Changing Society'* membedakan antara *'rule of law'* dalam arti formil yaitu dalam arti *'organized public power'*, dan *'rule of law'* dalam arti materiel yaitu *'the rule of just law'*. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah *'the rule of law'* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *'the rule of just law'* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *'the rule of law'* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *'the rule of law'*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *'the rule of law'* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

14)Pemikiran Friderich Julius Stahl

Friderich Julius Stahl mendefinisikannya suatu negara hukum yaitu Negara harus menjadi Negara hukum, ini adalah semboyan dan pada kenyataannya, juga kecenderungan akhir-akhir ini, ia harus secara pasti dan tidak dapat ditarik kembali menentukan dan mengamankan arah dan batas-batas kegiatannya dan ruang bebas warga negara, dan tidak memaksakan atas namanya sendiri atau secara langsung ide moral apa pun di luar lingkup itu, ini adalah konsepsi dari *Rechtsstaat* dan bukan bahwa negara harus membatasi diri untuk mengelola hukum dan tidak mengejar tujuan administratif atau hanya melindungi hak-hak individu. Tidak mengatakan apa pun tentang konten atau tujuan menyatakan tetapi hanya mendefinisikan cara dan metode untuk mencapainya.

Friderich Julius Stahl juga membedakan antara peradilan dan pengakuan inistrasi bahwa yang pertama memiliki tujuan utama mempertahankan hak individu dan kelompok (keadilan), sedangkan yang kedua bertujuan untuk kebaikan bersama dalam batas-batas hukum dan hak. Sehingga dalam hal Friderich Julius Stahl melihat negara hukum, terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi oleh negara yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, yaitu:

1. Jaminan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia;

2. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan;
4. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (*independent*).

15) Pemikiran Hans Kelsen

Pemikiran Hans Kelsen mengenai negara hukum merupakan perkembangan tentang negara hukum. Dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, Kelsen ingin melihat hubungan antara hukum dan negara. Kelsen melihat bahwa Negara adalah sebagai sebuah bentuk ketertiban dan juga sebagai sebuah komunitas yang didasari atas perintah.

Suatu negara hukum juga memerlukan adanya sebuah pengakuan dari negara yang lain terhadap kedaulatan, wilayah, perbatasan dan keberadaan dari warga negara suatu negara hukum, hal tersebut dikarenakan negara adalah bagian dari subyek hukum internasional yang nantinya terkait dengan adanya hak asasi manusia.

Dalam hal negara hukum perlu memiliki prinsip demokrasi sebagai bentuk dari sebuah kebebasan individu dalam menjalankan nilai politik yang sama, sehingga dalam hal ini adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki minoritas dalam suatu negara, seperti halnya terdapatnya sistem pemilihan yang memberikan setiap individu tanpa membedakan minoritas dan mayoritas dalam menggunakan hak memilihnya.

16) Pemikiran Friedrich August Hayek

Hayek mengatakan bahwa kekuasaan hukum dalam bentuk supremasi hukum juga lebih dari sekedar konstitusionalisme yang mensyaratkan bahwa hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu, namun disisi lain bahwa aturan yang dibuat tersebut hanya sebatas ide politik dikarenakan sebuah aturan tersebut akan menjadi suatu hukum apabila disahkan oleh badan legislator serta pihak legislator dapat membatalkan aturan hukum tersebut terhadap apapun yang ia buat kecuali legislator terikat dengan tradisi moral masyarakat, serta cita-cita bersama dari seluruh rakyat.

17) Pemikiran Brian Z. Tamanaha

Pandangan Brian Z. Tamanaha terhadap negara hukum merupakan sebuah ide politik. Ide dari negara hukum ini adalah sebuah ide yang baik untuk semua orang sehingga munculnya pemikiran tentang negara hukum serta kesatuan dari pihak-pihak di seluruh dunia untuk melaksanakan negara hukum merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa didalam sejarah bidang Hukum oleh Association of University Presses. keberadaan manusia sebagai suatu ide yang didukung secara global oleh negara-negara di dunia.

18) Pemikiran Jimly Asshiddiqie

Pandangan tentang negara hukum yang patut diperhatikan adalah dari Jimly Asshiddiqie, dimana pandangannya terhadap negara hukum terdapat didalam sebuah artikel yang berjudul “Gagasan Negara Hukum Indonesia” dimana, ia merumuskan tiga belas prinsip pokok negara hukum modern antara lain:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
12. Transparansi dan Kontrol Sosial;
13. Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada pentingnya pemikiran negara hukum serta perkembangan pemikiran negara hukum agar sesuai dengan perkembangan jaman serta perkembangan pemikiran manusia untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang lebih baik, dan terus lebih baik kedepannya dalam kehidupan umat manusia di bumi ini, sehingga kedepannya tidak ada lagi perselisihan yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi umat manusia dan kehancuran bagi peradaban umat manusia. Pemikiran negara hukum harus tetap dikembangkan kedepannya dan akan selalu menjadi acuan yang baik dalam menjalankan kehidupan baik secara internasional, bernegara maupun melaksanakan kehidupan dalam kegiatan secara individu dan tetap berpedoman kepada pemikiran negara hukum.

Cita negara hukum tersebut telah dimulai sejak zaman Yunani Kuno sekitar abad V SM, tepatnya di saat perkembangan kehidupan filsafat mengalami puncaknya. Ketika itu paling tidak dikenal dua orang filosof yang cukup gemilang dengan ide-idenya bagi perkembangan peradaban umat manusia berikutnya, kedua filosof itu adalah Plato dan Aristoteteles. Baik

Plato maupun Aristoteles, merupakan penggagas pemikiran tentang negara ideal, yakni suatu negara yang diatur dan diperintah berdasarkan hukum. Cita negara hukum tersebut dalam waktu cukup lama dilupakan orang, hingga kemudian sekitar awal abad XVII M barulah diskusi mengenai cita negara hukum menghangat kembali. Sedikitnya tiga nama yang cukup dikenal sebagai penggagas kembali cita negara hukum, yaitu John Locke, Montesquieu dan J. J. Rousseau. Ketiga tokoh tersebut telah dianggap berhasil memberikan pemikiran tentang suatu negara hukum secara lebih rinci. Oleh karena itu, berawal dari konsep - konsep mereka yang pada masa berikutnya (sekitar abad XIX M) istilah negara hukum itu diperkenalkan di beberapa negara, khususnya negara-negara yang lebih dahulu mengalami perkembangan yang sangat maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 201. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Laurensius Arliman S, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, Volume 4, Nomor 3, 2017. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>.
- Laurensius Arliman S, Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Supremasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018. <http://dx.doi.org/10.36441/hukum.v1i01.102> .
- Laurensius Arliman S, Memperkuat Kearifan Lokal Untuk Menangkal Intoleransi Umat Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, Nomor 1, 2018, <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18>.
- Laurensius Arliman S, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, Nomor 3, 2017, <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Uang Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jurnal Arena Hukum, Volume 12, Nomor 2, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5>.
- Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, Nomor 1, 2019, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.
- Laurensius Arliman S, Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional, UIR Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2018, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1587](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1587)
- Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, Ni Putu Eka Dewi, Protection of Children and Women's Rights in Indonesia through International Regulation Ratification, Journal of Innovation, Creativity and Change Volume 15, Nomor 6, 2021.
- Laurensius Arliman S, Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, 2016, <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.